

## **HUBUNGAN SIMULTAN SUMBER PENERIMAAN DAERAH, BELANJA MODAL DAN IPM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PUTRI VIALETA; AZWARDI; IMAM ASNGARI**  
*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,  
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

### **ABSTRACT**

*The objective of this research was to investigate and analyze the Simultaneous Relationship of Regional Revenue Sources, Capital Expenditure, and HDI toward the Economic Growth in the Province of South Sumatra. The data used in this study were the panel data. The samples of the study were 15 regencies/cities in the period of 2008 – 2013. The analysis technique was the Two – Stage Least Squares (TSLS) by using the eviews 7 program. The estimation of the first simultaneous equation showed that Capital Expenditure and HDI simultaneously had a significant positive influence on the Economic Growth with the F probability value of  $0.000000 < 0.05$  ( $\alpha = 5\%$ ), while the estimation of the second simultaneous equation indicated that the Local Own – Source Revenue, Revenue Sharing Fund, and General Allocation Fund Simultaneously had a significant positive influence on the Capital Expenditures with the probability value of  $0.000000 < 0.05$  ( $\alpha = 5\%$ ).*

*Keywords: Local Own – Source Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Capital Expenditures, HDI, and Economic Growth*

---

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Yani, 2008: 40).

Pergeseran penggunaan dana yang lebih besar untuk daerah, pada umumnya akan berdampak pada peningkatan peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan secara umum, utamanya yang berkaitan dengan fungsi alokasi, kecuali atas dana yang bersumber dari DAK, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh atas pengalokasian dan penggunaan dana perimbangan tersebut. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan (Widjaja, 2001 : 42).

Menurut Penelitian dari Wandira (2013 : 45), diberlakukannya otonomi daerah memberi kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal tersebut yang terdiri dari beberapa indikator dari sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

**Tabel 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 (juta rupiah).**

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Dana Bagi Hasil | Dana Alokasi Umum | Belanja Modal |
|-------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2008  | 1.142.995              | 875.656         | 581.218           | 891.581       |
| 2009  | 1.054.332              | 825.805         | 502.680           | 640.664       |
| 2010  | 1.369.936              | 1.293.169       | 512.084           | 1.032.890     |
| 2011  | 1.849.120              | 1.313.457       | 646.813           | 1.139.120     |
| 2012  | 2.001.715              | 1.617.244       | 716.153           | 1.017.182     |
| 2013  | 2.021.697              | 1.753.511       | 870.517           | 862.904       |

Sumber :Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui website (djpk.depkeu.go.id), 2015

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan relatif mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2009 PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, penurunan tersebut sebesar 88.663 (Juta Rupiah) . Sementara untuk Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum juga mengalami penurunan pada tahun 2009 masing – masing sebesar 49.851 (Juta Rupiah) dan 78.538 (Juta Rupiah). Sementara untuk perkembangan realisasi belanja modal dari tahun 2008-2013 cenderung mengalami fluktuasi di setiap tahunnya, dimana hasil tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Salah satu tujuan instrumen fiskal dari dana perimbangan yaitu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui belanja modal dan investasi swasta. Kontribusi belanja modal akan menarik investor untuk dapat berinvestasi di daerah sehingga akan memperluas basis kegiatan ekonomi diberbagai sektor, dan secara khusus memperlus lapangan usaha dan menurunkan tingkat pengangguran (Santosa, 2013 : 131).

Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan indikator utama yaitu PDRB. Akan tetapi perubahan PDRB dari tahun ke tahun tidak hanya disebabkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi tetapi juga oleh adanya kenaikan harga – harga. Oleh karena itu perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun dengan cara menghilangkan pengaruh perubahan harga – harga terhadap nilai PDRB pada berbagai tahun sehingga yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah PDRB atas dasar harga konstan (Komaria, dikutip dalam Ronald, 2010).

Pada hakekatnya, paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di setiap daerah. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penambahan Indeks Pembangunan Manusia dalam skripsi ini untuk mengklasifikasikan apakah suatu daerah adalah daerah maju, daerah berkembang, atau daerah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Jadi, pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Maka IPM sebagai indeks komposit digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas agar dapat berperan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dalam hal ini di Provinsi Sumatera Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Mangkoesoebroto (1993) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Publik*, Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini penulis bermaksud menjelaskan ketiga teori pengeluaran pemerintah secara makro menurut Mangkoesoebroto (1993 : 169).

#### **1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.**

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil.

#### **2. Hukum Wagner**

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan teori pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara – negara Eropa, U.S. dan Jepang pada abad ke – 19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam hukum yaitu : Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun meningkat. Dasar hukum teori tersebut pengamatan empiris dari negara – negara maju (USA, German, Jepang), tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks.

#### **3. Teori Peacock dan Wiseman**

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan atas pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan

masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena –mena.

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut : Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

### **Teori Penerimaan Pemerintah**

Penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas – luasnya yaitu yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Basri & Subri, 2003 : 43).

Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang, dan sebagainya. Penerimaan pemerintah lainnya adalah dari pajak. Definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesoebroto, 1993 : 181).

### **Teori Transfer**

Menurut *World Bank* (Shah & Boadway, 2007) dalam bukunya yang berjudul “*Intergovernmental Fiscal Transfer Principles and Practice*” mengemukakan bahwa pada dasarnya transfer pemerintah diklasifikasikan menjadi 2 kategori yaitu :

- *General – Purpose Transfer*; dialokasikan dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara umum. Dalam hal ini tidak ada batasan dalam penggunaan dana. Ciri dari *general – purpose transfers* adalah daerah atau lokal memiliki keleluasaan penuh dalam mengelola dan mengalokasikan dana yang ditransfer dari pusat.
- *Specific – Purpose Transfers*; bertujuan untuk memberikan intensif untuk pemerintah daerah dalam melakukan program atau kegiatan khusus. *Specific – purpose transfers* biasanya membiayai pengeluaran yang digunakan secara langsung yaitu seperti belanja modal, belanja rutin, atau kedua – keduanya. Sedangkan ciri dari *specific – purpose transfers* adalah transfer yang syarat ketentuannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan seringkali tujuan dari transfer ini dianggap penting oleh pemerintah pusat akan tetapi bisa saja dianggap tidak penting oleh pemerintah daerah.

### **Penelitian Terdahulu**

Arbie Gugus Wandira (2013) dengan judul penelitian “*Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah provinsi se-Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan penelitian dari Askam Tuasikal (2008) dengan judul penelitian *“Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”*. Data yang digunakan adalah data Sekunder dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dan secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Indonesia sementara PDRB tidak berpengaruh.

Windha Amiga Permanasari (2013) dengan judul penelitian *“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)”*. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel yang diperoleh sejumlah 105 laporan realisasi APBD serta PDRB harga konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, dengan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah (2013), dengan judul penelitian *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kabupaten dan Kota di Aceh)”*. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 kabupaten/kota, dan yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah 21 kabupaten/kota, sehingga jumlah amatan yang dianalisis menjadi 105. Data yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan realisasi PAD, DAU serta belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011. Data tersebut bersumber dari DJKD Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian dari Lilis Setyowati dan Yohana Kus Suparwati (2012) dengan judul *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening studi empiris pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah”*. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan data panel yaitu gabungan data *time-series* tahun 2005 - 2009 dan data *cross-section* yaitu 25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui alokasi anggaran belanja modal. DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui alokasi anggaran belanja modal. Dan pengalokasian anggaran belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM.

Penelitian dari Ndaroe Adya Firmandika (2012) yang berjudul *“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah serta Jumlah Pekerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2009”*. Metode analisis yang digunakan adalah GLS (*General Least Square*) dengan panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM, PAD, dan Jumlah Pekerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Timur Periode 2005-2009.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan membahas mengenai pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, Indeks Pembangunan Manusia, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Pembahasan dibatasi pada ruang lingkup Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2008 – 2013.

Data yang digunakan terdiri dari data sekunder dengan menggunakan data panel yaitu gabungan data *time-series* tahun 2008 - 2013 dan data *cross-section* yaitu 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data tersebut berupa laporan realisasi PAD, DBH, DAU, Belanja modal yang bersumber dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara laporan Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data panel dengan menggunakan metode *Two Stage Least Squares* (TSLS), terdapat dua model persamaan struktural yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Model Persamaan Substruktur I

$$\ln EG = \alpha_{01} + \alpha_{11} \ln BM_{it} + \alpha_{21} \ln IPM_{it} + e_1$$

### 2. Model Persamaan Substruktur II

$$\ln BM = \alpha_{02} + \alpha_{12} \ln PAD_{it} + \alpha_{22} \ln DBH_{it} + \alpha_{32} \ln DAU_{it} + e_2.$$

Dimana: EG = Pertumbuhan Ekonomi; BM = Belanja Modal; IPM = Indeks Pembangunan Manusia; PAD = Pendapatan Asli Daerah; DBH = Dana Bagi Hasil; DAU = Dana Alokasi Umum;  $\alpha_0$  = Konstanta;  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  = Koefisien regresi;  $e_1, e_2$  = Error Term

## Pengujian Signifikansi

### a. Uji Chow

Digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *Fixed Effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel *dummy* dengan jalan melihat variabel *residual sum of squares* (RSS).

### b. Uji Hausman

Uji Hausman didasarkan pada ide bahwa LSDV di dalam metode *fixed effect* dan GLS adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien.

## Uji Hipotesis

### a. Uji t (t – test)

Uji t digunakan untuk menguji keberartian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Asngari, 2008). Untuk menguji hipotesis yang diajukan, digunakan pendekatan uji signifikan. Jika hasil t test > nilai t tabel, berarti  $H_0$  ditolak. Sebaliknya, jika hasil test < nilai t tabel, berarti  $H_0$  diterima.  $H_0$  adalah hipotesis yang telah dinyatakan (Hipotesis nol). Hipotesis nol ( $H_0$ ) ini berlawanan dengan hipotesis alternatif ( $H_a$ ).

### b. Uji F (F - Test)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Asngari, 2008). Uji F dapat juga untuk menguji signifikansi koefisien determinasi ( $R^2$ ). Kriteria uji F adalah jika F hitung < F tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak (keseluruhan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen) dan sebaliknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi persamaan simultan pertama setelah melalui uji *chow* dan uji *hausman*, diketahui bahwa metode yang paling baik digunakan adalah metode *fixed effect*. Dengan hasil estimasi sebagai berikut:

| Variable                              | Coefficient | Std. Error         | t-Statistic | Prob.  |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C                                     | -16.41995   | 2.899482           | -5.663063   | 0.0000 |
| LOGBM?                                | 0.004742    | 0.032609           | 0.145418    | 0.8848 |
| LOGIPM?                               | 7.311802    | 0.752609           | 9.715275    | 0.0000 |
| Effects Specification                 |             |                    |             |        |
| Cross-section fixed (dummy variables) |             |                    |             |        |
| R-squared                             | 0.997618    | Mean dependent var | 14.85398    |        |
| Adjusted R-squared                    | 0.997096    | S.D. dependent var | 0.929325    |        |
| S.E. of regression                    | 0.050080    | Sum squared resid  | 0.183083    |        |
| F-statistic                           | 1896.994    | Durbin-Watson stat | 1.024273    |        |
| Prob(F-statistic)                     | 0.000000    | Second-Stage SSR   | 0.184425    |        |
| Instrument rank                       | 19          |                    |             |        |

Sumber : Data sekunder, diolah dengan Eviews 7

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, model persamaan simultan untuk persamaan pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 EG &= -16,41995 + 0,004742 \text{ BM} + 7,311802 \text{ IPM} \\
 T_{\text{hitung}} &= (-5.663063) \quad (0,145418) \quad (9,715275) \\
 R^2 &= 0,997618 \\
 F_{\text{hitung}} &= 1896,994
 \end{aligned}$$

### Analisis Kuantitatif Belanja Modal dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Belanja modal dan IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2008 – 2013, dapat dilihat dari nilai  $F_{\text{statistik}}$  sebesar 1896,994 yang lebih besar dari nilai  $F_{\text{tabel}}$  yaitu sebesar 2,323126 dengan taraf signifikansi sebesar  $\alpha = 5\%$ . Hal ini didukung dengan nilai probabilitas  $F_{\text{statistik}}$  sebesar 0,000000 dimana nilai tersebut signifikan terhadap alpha sebesar 5%.

Berdasar hasil estimasi diketahui bahwa koefisien regresi variabel belanja modal menunjukkan nilai positif sebesar 0,004742. Koefisien bernilai positif menunjukkan pengaruh positif belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya jika belanja modal mengalami kenaikan sebesar 1, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0,004742 dengan asumsi faktor lain diluar model dianggap tetap (*ceteris paribus*). Namun, hasil uji t menunjukkan bahwa nilai  $t_{\text{hitung}}$  dari belanja modal adalah 0,145418 dan nilai ini lebih kecil dibandingkan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,98861 ( $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ) pada tingkat  $\alpha = 5\%$  dengan nilai probabilitas sebesar 0,8848. Hal Ini berarti bahwa secara parial belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Budiono bahwa pertumbuhan itu harus bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Ketentuan ini sangat penting untuk diperhatikan dalam ekonomi wilayah, karena bisa saja suatu wilayah mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan/suntikan daerah dari pemerintah pusat dan pertumbuhan itu terhenti apabila suntikan dana itu dihentikan (Tarigan, 2005:46). Pernyataan tersebut merupakan gambaran untuk kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dimana pengalokasian Belanja Modal masih tergantung dari penerimaan yang diberikan oleh

pemerintah pusat seperti DBH dan DAU. Apabila penerimaan tersebut berhenti maka alokasi belanja modal menjadi tidak optimal dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Windha Amiga Permanasari (2013). Windha dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)*”. Menjelaskan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah dialokasikan pada belanja infrastruktur yang kurang produktif.

Kasus tersebut juga terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan, selain alasan tersebut, terdapat alasan lain yang membuat hasil menjadi tidak signifikan yaitu pendeknya rentang waktu penelitian, yaitu dari tahun 2008 – 2013 diduga juga turut mempengaruhi hasil penelitian, karena umumnya belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti bangunan dan jembatan peningkatannya akan lebih terlihat dalam rentang waktu beberapa tahun atau alokasi belanja modal belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek dikarenakan pembangunan infrastruktur masih berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut.

Sementara untuk variabel IPM hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki koefisien sebesar 9,715275 artinya adalah jika IPM mengalami kenaikan sebesar 1, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 9,715275 atau 9,71%. Koefisien bernilai positif artinya adalah kenaikan terhadap IPM juga akan diikuti dengan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara hasil Uji-t menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperkuat dengan hasil probabilitas  $t$ -statistik yaitu sebesar 0,0000 signifikan terhadap alpha sebesar 5%.

Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Ndaroe Adya Firmandika (2012) yang berjudul “*Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah serta Jumlah Pekerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2009*”. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adanya pengaruh yang signifikan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi yaitu karena adanya hubungan yang erat satu sama lain. IPM berkaitan dengan kualitas pembangunan manusia, apabila kualitas pembangunan manusia meningkat maka pengelolaan kekayaan daerah akan semakin efektif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi peningkatan IPM maka secara beriringan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

Alasan tersebut diperkuat dengan pernyataan Solow bahwa pertumbuhan ekonomi selalu bersumber dari satu atau lebih faktor kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal. Sedangkan salah satu alat untuk mengukur pembangunan kualitas dan kuantitas tenaga kerja adalah IPM (Todaro, 2003:150).

Hasil estimasi persamaan simultan kedua setelah melalui uji *chow* dan uji *hausman*, diketahui bahwa metode yang paling baik digunakan adalah metode *random effect*. Dengan hasil estimasi sebagai berikut :

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 0.055026    | 1.334709   | 0.041227    | 0.9672 |
| LOGPAD?  | 0.004969    | 0.004097   | 1.212826    | 0.2285 |
| LOGDBH?  | 0.576760    | 0.076387   | 7.550514    | 0.0000 |
| LOGDAU?  | 0.400477    | 0.095538   | 4.191803    | 0.0001 |



| Effects Specification |          |                    |          |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|
|                       |          | S.D.               | Rho      |
| Cross-section random  |          | 0.161092           | 0.1862   |
| Idiosyncratic random  |          | 0.336811           | 0.8138   |
| Weighted Statistics   |          |                    |          |
| R-squared             | 0.500999 | Mean dependent var | 8.042416 |
| Adjusted R-squared    | 0.483592 | S.D. dependent var | 0.502805 |
| S.E. of regression    | 0.361323 | Sum squared resid  | 11.22768 |
| F-statistic           | 28.78148 | Durbin-Watson stat | 1.502926 |
| Prob(F-statistic)     | 0.000000 | Second-Stage SSR   | 11.22768 |
| Instrument rank       | 5        |                    |          |
| Unweighted Statistics |          |                    |          |
| R-squared             | 0.598952 | Mean dependent var | 12.38777 |
| Sum squared resid     | 13.32228 | Durbin-Watson stat | 1.266627 |

Sumber : Data sekunder, diolah dengan Eviews 7

Maka berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, model persamaan simultan untuk persamaan kedua dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{BM} &= 0,055026 + 0,004969 \text{ PAD} + 0,576760 \text{ DBH} + 0,400477 \text{ DAU} \\
 T_{\text{hitung}} &= (0,041227) \quad (1,212826) \quad (7,550514) \quad (4,191803) \\
 R^2 &= 0,500999 \\
 F_{\text{hitung}} &= 28,78148
 \end{aligned}$$

### Analisis Kuantitatif Sumber Penerimaan Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PAD, DBH, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dalam kurun waktu 2008 – 2013. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai  $F_{\text{statistik}}$  sebesar 28,78148 yang lebih besar dari nilai  $F_{\text{tabel}}$  yaitu sebesar 2,323126 dengan probabilitas sebesar 0,000000 dari taraf signifikansi sebesar  $\alpha = 5\%$ .

Hasil tersebut sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Wagner. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam hukum yaitu : Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun meningkat (Mangkoesoebroto, 1993).

Berdasar hasil analisis estimasi, diketahui bahwa koefisien regresi variabel PAD menunjukkan nilai positif sebesar 0,004969. Koefisien bernilai positif artinya bahwa variabel PAD ini memiliki hubungan positif terhadap variabel belanja modal. Apabila PAD mengalami kenaikan sebesar 1, maka belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,004969 dengan asumsi faktor lain diluar model dianggap tetap (*ceteris paribus*). Namun, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan, ini dapat dilihat dari nilai  $t_{\text{hitung}}$  dari PAD adalah 1,212826 dan nilai ini lebih kecil dibandingkan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,98861 ( $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ) dengan probabilitas sebesar 0,2285 tidak signifikan pada tingkat  $\alpha = 5\%$ . Ini berarti bahwa secara parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya dari Rita Devi Setiyani (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Studi Empiris pada Kabupaten di Karesidenan Pati Periode 2009-2013”.

Hasilnya adalah PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan ada nilai PAD yang rentangnya sangat jauh, yaitu antara Provinsi Maluku dan Provinsi DKI Jakarta, terbukti dari analisis deskriptif rata – rata PAD berjumlah Rp. 2,1 trilyun, dengan rincian nilai terendah Rp. 93,6 milyar terdapat di Provinsi Maluku Utara dan nilai tertinggi Rp. 18,6 trilyun terdapat di Provinsi DKI Jakarta.

Kasus yang hampir sama juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, dimana masih adanya kesenjangan nilai PAD antara Kabupaten/Kota yang cukup jauh. Berdasarkan statistik deskriptif memperlihatkan bahwa di tahun 2013 nilai PAD yang terbesar ada di Kota Palembang sebesar 23.349.298 (juta rupiah) sementara nilai PAD terkecil berada di Kabupaten Pagar Alam sebesar 722.419 (juta rupiah). Jumlah tersebut tentu sangat berbeda jauh dan menjadi salah satu faktor ketidaksignifikan variabel PAD terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil regresi TSLS menunjukkan bahwa variabel DBH memiliki koefisien yang positif sebesar 0,576760 artinya adalah kenaikan terhadap DBH sebesar 1 akan diikuti dengan peningkatan terhadap Belanja Modal sebesar 0,576760 atau 57,6%. Sementara hasil Uji-t menunjukkan bahwa variabel DBH berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal yang diperkuat dengan hasil probabilitas  $t_{\text{-statistik}}$  yaitu sebesar 0,0000 dan signifikan terhadap  $\alpha=5\%$ .

Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Oviliza Haryuli (2015) yang berjudul “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Provinsi Kepulauan Riau*”. Penelitian ini memberikan hasil bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Tujuan utama dari dana bagi hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hasil tersebut juga didukung teori pertumbuhan jalur cepat yang dikemukakan Samuelson (1995), setiap wilayah perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor tersebut memiliki *competitive advantage* (Tarigan, 2005:54). Artinya disini bahwa, pemerintah daerah setiap Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan telah menyadari keunggulan berbagai sektor terutama sektor SDA yang dimiliki sehingga penerimaan daerah dalam hal kekayaan sumber daya alam memberikan kontribusi yang besar dan secara otomatis Dana Bagi Hasil yang diberikan kepada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan juga besar dan sangat berkontribusi untuk pengeluaran pemerintah daerah dalam belanja modal.

Sementara untuk variabel DAU hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel DAU memiliki koefisien yang positif sebesar 0,400477 artinya adalah kenaikan terhadap DAU sebesar 1 akan diikuti dengan peningkatan terhadap Belanja Modal sebesar 0,400477 atau 40,04% dengan asumsi faktor – faktor lain dianggap tetap. Sementara hasil Uji-t menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal yang diperkuat dengan hasil probabilitas  $t_{\text{-statistik}}$  yaitu sebesar 0,0001 signifikan terhadap  $\alpha=5\%$ .

Hasil yang signifikan dikarenakan DAU adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sehingga dana yang diberikan akan mengatasi kesenjangan antar daerah.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Askam Tuasikal (2008) yang berjudul “*Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*”. Hasil menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan Hasil estimasi persamaan simultan yang pertama menunjukkan bahwa secara bersamaan Belanja Modal dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu dapat dilihat dari nilai probabilitas F sebesar  $0,000000 < 0,05$  ( $\alpha=5\%$ ).

Hasil estimasi persamaan simultan kedua menunjukkan bahwa PAD, DBH, dan DAU secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai probabilitas sebesar  $0,000000 < 0,05$  ( $\alpha=5\%$ ).

### Saran-Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah daerah sampel penelitian dan rentang waktu penelitian sehingga hasil penelitian menjadi lebih rinci dan mendalam.
2. Optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk PAD merupakan salah satu alternatif sumber penerimaan utama. Untuk itu peningkatan PAD secara intensif perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah, termasuk membenahi regulasi terkait peningkatan PAD.
3. Manajemen Pengeluaran Pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang mampu memberikan efek positif terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan (peningkatan IPM) sehingga dapat menyokong pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Asngari, Imam. 2007. *Modul Ekonometrika Program Eviews dan SPSS*. Laboratorium Komputer, Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota*. Palembang : BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2014. *Sumatera Selatan Dalam Angka (Sumatera Selatan In Figures)*. Palembang : BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2015. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2011-2014*. Palembang : BPS.
- Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Subri, 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Penerbit :PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Boadway, Robin & Anwar Shah. 2007. *Intergovernmental Fiscal Transfers Principles and Practice*. Penerbit : The World Bank, Washington, D.C.
- Firmandika, Ndaroe Adya. 2012. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah serta Jumlah Pekerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2009. *Skripsi*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Haryuli, Oviliza & dkk. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Riau.
- Komaria, Nur. 2013. Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit : BPFE, Yogyakarta.
- Mawarni, Darwanis & Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*, pp. 80-90. Universitas Syiah Kuala.

- Permanasari, Windha Amiga. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal ekonomi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol 5 No. 2.
- Setiyani, Rita Devi. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Studi Empiris pada Kabupaten di Karesidenan Pati Periode 2009-2013. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi keenam. Penerbit : Gramedia, Jakarta.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol 1 No.2 : Hal 142-155.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Widjaja, A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Penerbit : Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi. Penerbit : Rajagrafindo Persada, Jakarta.